

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Todaro (2012) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara yang dibentuk dari capaian bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil yang disesuaikan (Damayanti, 2018:12).

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Indeks pembangunan manusia merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak (Bakar, 2020:20).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu konsep yang diperkenalkan pertama kali oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990, dimana konsep ini mencoba menggabungkan antara indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli. UNDP

(The United Nations Development Program) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memerhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup secara bebas (Murni,2016:193)

Menurut United Nations Development Program (UNDP) , dalam indeks pembangunan manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.

Menurut Rusandi (2018:16) IPM memiliki tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan operasional mudah untuk dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia, artinya IPM mengukur suatu capaian dalam pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Pembangunan manusia sendiri menjelaskan mengenai penghapusan kondisi-kondisi yang membatasi kemampuan dan menolak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

2.1.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Indeks (HDI)*. Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: (UNDP, *Human Development Report* 2016: 105-106)

1. *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*.
2. *Educational achievement*, diukur dengan dua indikator yaitu melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
3. *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

a. Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah suatu perkiraan tingkat umur rata-rata yang akan dicapai oleh penduduk oleh kurun waktu tertentu. Menurut BPS harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dengan demikian angka harapan hidup dapat mengukur dari sejak lahir dalam rata-rata hidup di suatu penduduk.

Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup dari hasil survey sosial ekonomi nasional yaitu:

- 1) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
- 2) Rata-rata lama sakit (hari).
- 3) Angka kesakitan.
- 4) Persentase pemberian ASI.
- 5) Rata-rata bayi disusui (Bulan).

Indikator-indikator diatas dapat meningkatkan angka harapan hidup, sehingga indikator tersebut memaksa pemerintah untuk meningkatkan program-program kesehatan seperti peningkatan pelayanan publik yang dapat memicu meningkatkan harapan hidup penduduk.

b. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang. Perhitungan indeks pembangunan manusia terbagi dua indikator yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama

sekolah. Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang di harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa yang akan datang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun keatas.

c. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak dalam cakupan luas menggambarkan tingkat kesejahteraan yang diminati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Indeks ini menunjukkan betapa seharusnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjalani kehidupan yang secara layak. Untuk mengukur standar hidup layak (daya beli) UNDP menggunakan GNP riil yang di sesuaikan (Rusandi,2018:16-20).

2.1.1.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

IPM yang dimunculkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) semenjak tahun 1990, berfungsi menggambarkan progres pembangunan manusia secara berkelanjutan. Indeks pembangunan manusia ini dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu sebagai berikut (Muslikhati, 2018: 75) :

a. Peluang Hidup (*Longevity*)

Cakupan peluang hidup dalam hal ini di ukur dari angka harapan hidup (AHH) yang di hitung melalui metode tidak langsung (metode brass, varian trussel) berlandaskan adanya variabel rataan anak lahir hidup dan rataan yang masih hidup.

b. Pengetahuan (*Knowledge*)

Konsep pengetahuan di takar dengan (a) indikator melek huruf, yang diperoleh dari kemampuan membaca dan menulis lalu (b) indikator rata-rata lama sekolah yang dihitung melalui 2 variabel secara simultan.

c. Standar Hidup Layak (*Decent Living*)

Komponen dasar dari hidup layak di ukur melalui rata-rata konsumsi riil yang disesuaikan (GNP) per kapita. Perhitungan ini dilandaskan pada purchasing power parity (Risyadi,2018: 29-30).

2.1.1.4 Manfaat IPM

Menurut Muslikhati (2018:76) Adapun manfaat dari Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b. IPM menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.
- c. Untuk negara indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum (DAU).

2.1.1.5 Tujuan indeks pembangunan manusia

Perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan memiliki tujuan penting diantaranya (Rusandi, 2018: 20).

- a. Membangun indikator yang dapat mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.

- b. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut tetap sederhana.
- c. Membentuk satu indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

2.1.2 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Masalah distribusi pendapatan telah lama menjadi persoalan yang rumit dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Ketimpangan Distribusi Pendapatan adalah Distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total diantara berbagai rumah tangga dalam negara (Todaro,2012).

Masalah ketimpangan distribusi pendapatan ini mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan aspek yang kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk. Kondisi ketimpangan pendapatan yang cukup besar terjadi menimbulkan perbedaan pendapatan yang timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan barang modal.

Karakteristik suatu wilayah mempunyai pengaruh kuat pada pola pembangunan ekonomi. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan pada beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lain tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan

baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah yang terjadi di Kabupaten/kota di Provinsi Indonesia.

Terdapat dua ukuran utama distribusi pendapatan menurut para ahli ekonomi, baik ditinjau dari tujuan analisis maupun kuantitatif Arsyad (2016), yaitu:

1. Distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution of income*).

Distribusi pendapatan perorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu atau perorangan termasuk pula rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga yang mencari penghasilan tersebut berasal dari bekerja atau sumber lainnya seperti bunga, hadiah, keuntungan maupun warisan. Demikian pula tempat dan sektor sumber pendapatanpun turut diabaikan.

2. Distribusi pendapatan fungsional

Distribusi pendapatan fungsional mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi. Faktor produksi tersebut terdiri dari tanah atau sumberdaya alam, tenaga kerja, dan modal. Pendapatan didistribusikan sesuai dengan fungsinya seperti buruh menerima upah, pemilik tanah menerima sewa dan pemilik modal menerima bunga serta laba. Jadi setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusinya pada produksi nasional, tidak lebih dan tidak kurang.

2.1.2.1 Faktor-faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan umumnya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Menurut Adelman dan Morris dalam Arsyad (2016), terdapat delapan faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan pada negara yang sedang berkembang, yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (Capital Intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi Negara Sedang Berkembang dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan Negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor Negara Sedang Berkembang.

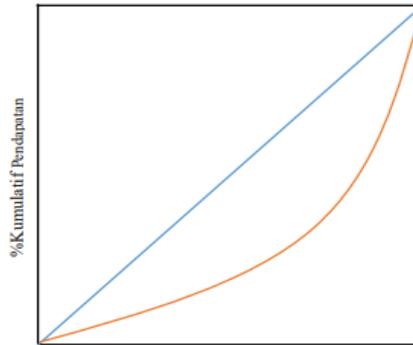
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

2.1.2.2 Indikator distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan menggunakan Koefisien Gini dan kurva Lorenz(Arsyad,2016).

1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz diambil dari nama Conrad Lorenz, seorang ahli statistika dari Amerika Serikat. Pada tahun 1950, ia menggambarkan hubungan Antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (shere) pendapatan mereka. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. (Arsyad,2016).



Gambar 2.1
Kurva Lorenz

Ket:

Garis biru = Garis kemerataan

Garis merah = Kurva Lorenz

2. Gini Rasio

Menurut Todaro dan Smith (2011) Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat dan bisa memiliki nilai berapa pun, berkisar dari 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketimpangan sempurna). Koefisien Gini merupakan alat ukur untuk mengukur tingkat ketidakmerataan pendapatan relatif. Koefisien gini adalah variabel yang dinamis dalam artian besarnya dapat berubah antar waktu, daerah maupun antar sektor dalam negara (Risyadi, 2018: 44).

Gini Rasio bernilai antara 0 sampai 1. Bila indeks gini sama dengan 0 berarti terjadi distribusi pendapatan yang sempurna merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Akan tetapi, apabila indeks gini sama dengan 1 maka terjadi ketimpangan distribusi pendapatan sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja.

Dalam penelitian (Risyadi, 2018:44-45) Besarnya pengukuran angka koefisien Gini berkisar 0 dan 1, yang memaparkan keadaan distribusi pendapatan. Apabila semakin besar koefisien Gini (yaitu mendekati 1) maka akan semakin timpang distribusi pendapatannya, dan juga pula sebaliknya.

Gini Rasio atau Distribusi pendapatan adalah penyebaran pendapatan / perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat. Maksudnya distribusi pendapatan merupakan perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat yang mengakibatkan adanya perbedaan pendapatan yang lebih besar antar lapisan dalam masyarakat sehingga kesejahteraan hanya dapat dirasakan oleh golongan tertentu saja (Meydiasari dan Soejoto, 2017:117).

Perkembangan Koefisien Gini akan sesuai proses pembangunan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah setempat. Apabila semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara maka koefisien ini cenderung semakin membesar baik antar waktu, daerah maupun antar sektor, namun bisa juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin dalam suatu negara.

Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan Agregat adalah ukuran terakhir yang sangat sederhana dan ringkas mengenai tingkat relatif ketimpangan pendapatan di sebuah negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio dari bidang yang berada di antara bidang diagonal dan kurva Lorenz kemudian dibagi dengan total bidang setengah bujur sangkar tempat kurva itu terletak. Rasio ini dikenal dengan nama *rasio konsentrasi Gini* (*Gini Concentration ratio*) atau Koefisien Gini (*Gini Coefficient*),

berdasarkan nama ahli statistik berkebangsaan italia yang pertama kali merumuskannya pada tahun 1912 (Todaro dan Smith, 2011:257).

Koefisien Gini dapat menggunakan ukuran agregat untuk memutuskan perekonomian mana yang lebih merata. Koefisien gini termasuk dalam salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria yang sangat dicari (Todaro dan Smith, 2011:258-259).

- a. *Prinsip anonimitas (anonymity principle)* berarti bahwa ukuran ketimpangan tidak perlu bergantung pada siapa yang berpendapatan lebih tinggi; artinya, tidak perlu bergantung pada apa yang kita yakini sebagai manusia yang lebih baik, baik itu orang kaya atau orang miskin.
- b. *Prinsip independensi skala (scale independence principle)* berarti bahwa ukuran ketimpangan tidak perlu bergantung pada ukuran perekonomian atau cara kita mengukur pendapatannya; artinya, ukuran ketimpangan tidak mempersoalkan apakah mengukur pendapatan dalam dolar atau dalam sen, dalam rupee atau dalam rupiah, atau apakah perekonomian itu secara rata-rata kaya atau miskin karena jika ingin mengukur ketimpangan, memerlukan ukuran sebaran pendapatan, bukan besarnya (meski perlu kita ingat bahwa besaran atau jumlah pendapatan sangat penting dalam pengukuran kemiskinan).
- c. *Prinsip independensi penduduk (population independence principle)* agak serupa dengan prinsip sebelumnya, prinsip ini menyatakan bahwa ukuran ketimpangan tidak perlu didasarkan pada jumlah orang yang menerima pendapatan.

d. *Prinsip transfer (transfer principle)* adakalanya disebut prinsip *Pigou-Dalton*, sesuai dengan nama penciptannya; yang menyatakan bahwa, dengan asumsi semua pendapatan lainnya konstan, jika kita mentransfer sejumlah pendapatan dari orang yang lebih kaya kepada orang yang lebih miskin (tetapi tidak terlalu banyak sehingga orang yang lebih miskin itu menjadi lebih kaya dari orang yang awalnya lebih kaya) maka distribusi pendapatan yang baru akan menjadi lebih merata.

2.1.3 Hubungan ketimpangan (Gini Rasio) terhadap indeks pembangunan manusia

Menurut Todaro, ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya akan dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa disimpulkan bahwasanya apabila dengan menurunnya kesejahteraan masyarakat di suatu negara karena adanya ketimpangan, maka juga akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di negara tersebut (Risyadi, 2018: 50). Dengan adanya ketimpangan pendapatan maka konsumsi masyarakat pun akan berbeda, jika semakin timpang tentunya banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari sandang, papan, pangan serta pendidikan dan kesehatan. Oleh

karena itu semakin meningkatnya angka indeks gini akan berpengaruh buruk terhadap indeks pembangunan manusia yaitu menurun (Astuti, 2018:28).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Nina dan Rustariyuni (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran non makanan dan belanja modal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi bali. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa gini rasio dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin sedangkan belanja non pangan berpengaruh positif dan signifikan. Hasil pengujian variabel gini rasio terhadap kesejahteraan masyarakat, pengeluaran non pangan dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Febriantianingrum dkk (2017) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia terhadap indeks kebahagiaan di indonesia tahun 2014 dan 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Squares (OLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi tahun 2017, kesenjangan pendapatan tahun 2014 dan 2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks kebahagiaan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dan IPM tahun 2014 dan 2017 berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kebahagiaan.

Rustariyuni (2014) Melakukan Penelitian tentang pengaruh gini rasio, pengeluaran non makanan per kapita, belanja daerah dan laju pertumbuhan ekonomi pada indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di provinsi bali periode 2004-2012. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik provinsi bali. Metode analisis yang digunakan adalah metode pooled least square dengan menggunakan data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, variabel gini ratio, pengeluaran non makanan perkapita, belanja daerah dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung pada indeks pembangunan manusia pada 9 (sembilan) kabupaten/kota di provinsi bali. Secara parsial variabel gini ratio, pengeluaran non makanan perkapita, belanja daerah dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan pada indeks pembangunan manusia. Hubungan positif antara keempat variabel bebas dan variabel terikat ini menunjukkan bahwa pemerintah hendaknya melakukan pemerataan pembangunan, belanja daerah, pendapatan perkapita dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menjaga agar indeks pembangunan manusia di provinsi bali mengalami peningkatan.

Risyadi (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan syariah, belanja pemerintah, dan gini ratio terhadap indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di indonesia tahun 2012-2016. Data yang digunakan adalah data sekunder pada laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh badan pusat statistik. Penelitian ini merupakan

penelitian kuantitatif menggunakan regresi data panel dan path analysis dengan jalur software program eviews 9.0 . hasil analisis menunjukkan bahwa pada struktur 1 variabel pembiayaan perbankan syariah, belanja pendidikan dan belanja kesehatan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan gini ratio memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks pembangunan manusia, dan secara simultan variabel pembiayaan perbankan syariah, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan gini ratio berpengaruh bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia.

Bakar (2020) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten mimika. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS kabupaten mimika dan bagian keuangan dan aset daerah kabupaten mimika melalui teknik dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga yang diproksikan dari pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan berpengaruh signifikan terhadap IPM, pengeluaran pemerintah yang diproksikan dengan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, belanja konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM kabupaten mimika.

Laode dkk (2020) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor

pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi sulawesi utara (2015-2018). Model regresi digunakan adalah analisis regresi data panel dengan metode random efek. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Secara bersama-sama hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap IPM di provinsi sulawesi utara tahun 2015-2018.

Susilo dkk (2020) melakukan penelitian tentang analisis indeks pembangunan manusia di provinsi papua. Metode penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif deskriptif yang diperoleh melalui data sekunder badan pusat statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, rasio gini dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks pembangunan manusia, jumlah pengangguran dan gini rasio berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sehingga saran penelitian ini, dalam peningkatan indeks pembangunan manusia pemerintah dapat melakukan beberapa kebijakan mengenai jumlah pengangguran, rasio gini, jumlah penduduk terutama tingkat kemiskinan.

Meydiasari dan Soejoto (2017) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh distribusi pendapatan, tingkat pengangguran dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di Indonesia. Metode yang digunakan melalui regresi data panel dengan model fixed effect diperoleh hasil bahwa variabel distribusi pendapatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Adapun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai R² sebesar 0,9644 artinya ketiga variabel tersebut berpengaruh sebesar 96,44 % terhadap IPM dan 3,56% IPM dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Muslikhati (2018) melakukan penelitian tentang analisis kausalitas pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *granger causality*. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan bisa juga digunakan sebagai alat untuk melihat arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa uji kausalitas granger pada model penelitian yang diusulkan menyatakan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara dua variabel independen dan variabel dependen, tetapi secara signifikan variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki hubungan satu arah dengan IPM.

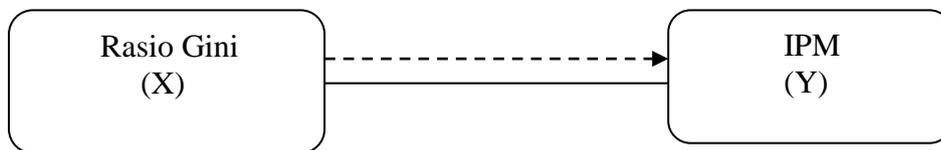
Hakiki dkk (2020) melakukan penelitian tentang Estimasi model indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Jambi. Metode analisis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, ketimpangan distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, angka partisipasi sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Pratowo (2013) melakukan penelitian tentang Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari publikasi hasil survei yang berhubungan dengan Badan Statistik (BPS) dengan time series dari tahun 2002 hingga 2009. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Elastisitas IPM meningkat karena adanya peningkatan pengeluaran sebesar 0,032. Jika belanja daerah naik 1 persen, maka rata-rata IPM akan naik sekitar 0,032 persen. Rasio gini berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Elastisitas peningkatan IPM sehubungan dengan penurunan rasio gini adalah sebesar - 0,034. Jika rasio gini turun 1 persen, maka IPM rata-rata akan naik sekitar 0,034 persen. Proporsi pengeluaran non makanan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. IPM meningkat elastisitasnya terhadap peningkatan proporsi pengeluaran non makanan sebesar 0,172. Jika proporsi pengeluaran

non makanan naik 1 persen, maka rata-rata IPM akan naik sekitar 0,172 persen.

2.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

----- Secara Parsial

————— Secara Simultan

Gambar 2.2
Kerangka pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa Gini rasio (X) berpengaruh signifikan terhadap IPM (Y) di Provinsi Sumatera Selatan baik secara Parsial maupun secara Simultan ?